



INTERSEKSIONAL DAN KEKERASAN PEREMPUAN DALAM CERPEN PENGAKUAN SUAMI PARINEM

Devi Apyunita¹⁾, Nur Hasbi²⁾

^{1,2}Universitas Negeri Makassar
Korespondensi: devi.apunita@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kekerasan terhadap perempuan dalam cerpen Pengakuan Suami Parinem melalui pendekatan feminisme interseksional dan poskolonial. Sastra dipahami sebagai ruang representasi sosial yang merefleksikan relasi kuasa, termasuk ketimpangan gender yang bersifat struktural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik analisis teks melalui *close reading*. Data berupa kutipan-kutipan yang merepresentasikan pengalaman perempuan, seperti kekerasan seksual, stigma sosial, penghapusan identitas, dan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh perempuan mengalami kekerasan berlapis akibat persilangan antara sistem patriarki dan kolonial. Kekerasan tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga simbolik melalui stigma, pengabaian sosial, serta dominasi narasi laki-laki. Selain itu, tubuh perempuan berfungsi sebagai arsip trauma, sementara ingatan menjadi bentuk resistensi terhadap penghapusan sejarah. Penelitian ini menegaskan bahwa perempuan dalam teks sastra merupakan subjek historis yang aktif dalam menegosiasikan posisinya dalam struktur kekuasaan.

Kata Kunci: feminisme interseksional, poskolonial, cerpen, kekerasan

Abstract

This research aims to analyze the representation of violence against women in the short story Pengakuan Suami Parinem using an intersectional feminist and postcolonial approach. Literature is understood as a space of social representation reflecting power relations, including structural gender inequality. This research employs a descriptive qualitative method with text analysis through close reading. The data consist of textual excerpts representing women's experiences such as sexual violence, social stigma, identity erasure, and resistance. The findings reveal that the female character experiences layered violence resulting from the intersection of patriarchal and colonial systems. Violence appears not only in physical forms but also symbolically through stigma, social neglect, and male narrative dominance. Furthermore, the female body functions as an archive of trauma, while memory becomes a form of resistance against historical erasure. This research highlights women as historical subjects who actively negotiate their position within power structures.

Keywords: intersectional feminism, postcolonial, short story, violence

1. Pendahuluan

Sastra merupakan ruang representasi sosial yang merefleksikan berbagai relasi kuasa dalam masyarakat, termasuk relasi gender yang bersifat tidak setara (Nensilianti, dkk). Dengan pengertian yang lain, Sastra merupakan produk imajinasi yang tidak sepenuhnya bersifat rekaan, sebab kerap merefleksikan hasil pengamatan pengarang terhadap realitas kehidupan di sekitarnya (Budianta, 2002). Oleh karena itu, karya sastra dapat dipahami sebagai bentuk "rekaman" realitas sosial yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu tertentu, sehingga sering dipandang sebagai dokumen sosial. Di samping berfungsi sebagai bahan bacaan, karya sastra juga memiliki kemampuan untuk merekam sekaligus mengisahkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi (Nensilianti, dkk., 2023). Melalui karya tersebut, pengarang berupaya menghayati berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, baik yang dialami secara langsung maupun yang terjadi pada orang lain dan kelompok masyarakat, sehingga mampu memberikan nilai serta manfaat bagi pembacanya (Noermanzah, 2017 dalam Utami, 2020).

Selain itu, karya sastra dapat dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling berkaitan dalam membentuk satu kesatuan yang utuh. Sejalan dengan pendapat Pradopo (dikutip dalam Jabrohim, 2015:69 dalam Febrianto, 2020), karya sastra merupakan struktur otonom yang dapat dipahami sebagai kesatuan menyeluruh melalui keterjalinan unsur-unsur pembangunnya. Dengan demikian, keutuhan dalam karya sastra bukan sekadar kumpulan unsur yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang saling terhubung dan membentuk makna secara menyeluruh.

Cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra fiksi. Menurut Priyatni (2010:126), cerpen sebagaimana namanya menunjukkan karakteristik yang serba singkat, baik dari segi peristiwa yang disajikan, isi cerita, jumlah tokoh, maupun jumlah kata yang digunakan. Sebagai karya sastra, cerpen cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan karya lain seperti novel. Umumnya, cerpen berfokus pada satu peristiwa utama, menggunakan alur tunggal, serta memiliki rentang waktu yang relatif singkat dan terbatas. Cerpen Pengakuan Suami Parinem menjadi signifikan untuk dikaji karena menghadirkan narasi perempuan yang berada dalam persimpangan kekerasan kolonial dan patriarki yang saling berkelindan. Tokoh Parinem diposisikan sebagai subjek yang mengalami kekerasan berlapis, yang tidak hanya berdampak pada tubuhnya secara fisik, tetapi juga membentuk trauma historis yang berkelanjutan.

Pendekatan interseksionalitas merupakan konsep dalam kajian feminisme yang menitikberatkan pada analisis berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan kemudian berkembang penggunaannya dalam kajian sastra feminis. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Crenshaw (1989) untuk menjelaskan pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan kulit hitam, yang dianalogikan sebagai persimpangan jalan tempat berbagai bentuk penindasan seperti ras dan gender bertemu dan saling beririsan. Oleh karena itu, interseksionalitas menyoroti bahwa perempuan dapat mengalami ketertindasan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, dunia kerja, relasi sosial, hingga media sosial. Selanjutnya, Crenshaw 1991 (dalam Mustaqim, 2018) menjelaskan bahwa interseksionalitas berkaitan dengan interaksi antara ras dan gender dalam struktur sosial, politik, dan representasi, serta berfokus pada pembentukan identitas perempuan melalui pengalaman penindasan tersebut yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosiologisnya.

Identitas perempuan dalam perspektif feminisme dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, tradisi, ekonomi, dan sistem patriarki yang dominan. Feminisme kontemporer menegaskan bahwa patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dan menciptakan struktur dominasi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat melalui kontrol atas tubuh, pilihan, serta peran sosialnya (lihat perlawanan terhadap patriarki dalam sistem sosial yang membatasi akses perempuan dalam berbagai aspek kehidupan), (Althaaf et al., 2025). Kajian feminisme kontemporer juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan simbolik, seperti stigma sosial, penghapusan identitas, dan pengucilan sosial (Bourdieu, 2001). Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali bekerja secara laten dan terlegitimasi dalam praktik sosial, sehingga memperkuat posisi subordinat perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, analisis sastra feminis menjadi penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana kekerasan direpresentasikan, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam teks sastra (Mukminin, 2024).

Meskipun kajian mengenai sastra feminis telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada representasi perempuan dalam kerangka patriarki secara umum, tanpa secara mendalam mengkaji keterkaitan antara kekerasan gender dengan konteks kolonial dan relasi kuasa negara. Selain itu, penggunaan pendekatan feminisme interseksional dalam analisis cerpen Indonesia masih relatif terbatas, khususnya dalam mengungkap bagaimana pengalaman perempuan dibentuk oleh persilangan antara gender, sejarah kolonial, dan struktur kekuasaan. Penelitian sebelumnya juga cenderung menempatkan perempuan sebagai objek penderitaan, tanpa mengeksplorasi perempuan sebagai subjek yang memiliki agensi, termasuk dalam bentuk resistensi melalui ingatan dan narasi.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan feminisme interseksional dan poskolonial pada cerpen Pengakuan Suami Parinem, sehingga mampu mengungkap dinamika kekerasan perempuan secara lebih komprehensif dan berlapis. Penelitian ini tidak hanya menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan, tetapi juga menempatkan perempuan sebagai subjek historis yang aktif dalam membangun resistensi melalui ingatan traumatik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas kajian sastra feminis, khususnya dalam memahami keterkaitan antara gender, kolonialisme, dan produksi ingatan dalam teks sastra Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami makna dan relasi kuasa yang direpresentasikan dalam cerpen Pengakuan Suami Parinem. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi fenomena sosial dan kultural dalam teks, tanpa menggunakan data numerik (Moleong, 2017). Sumber data penelitian adalah cerpen Pengakuan Suami Parinem. Data berupa kutipan-kutipan yang merepresentasikan pengalaman perempuan, khususnya terkait kekerasan gender, subordinasi, stigma sosial, penghapusan identitas, dan resistensi.

Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dan baca-catat dengan membaca teks cerpen secara intensif dan berulang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *close reading*

melalui tahap reduksi, klasifikasi, dan interpretasi data. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan feminisme interseksional untuk melihat persilangan relasi gender, kelas, dan kekuasaan (Yuval-Davis, 1997), serta pendekatan poskolonial untuk mengkaji pengaruh relasi kuasa kolonial terhadap pengalaman perempuan (Spivak, 1988). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teori dan pembacaan berulang untuk memastikan konsistensi serta ketepatan interpretasi. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Seksual Sistemik sebagai Instrumen Kolonial

“Dia menolak dengan sekuat tenaga. Namun, tentara pertama berhasil merobek pakaiannya.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dijadikan objek dominasi dalam sistem kekuasaan kolonial. Tindakan “merobek pakaian” tidak hanya bermakna kekerasan fisik, tetapi juga simbol pelucutan martabat dan kontrol atas tubuh perempuan. Dalam perspektif feminisme poskolonial, sebagaimana dijelaskan oleh Chandra Talpade Mohanty (2003), kekerasan seksual merupakan bagian dari strategi ideologis untuk menegaskan kekuasaan penjajah.

Penolakan tokoh perempuan menandakan adanya resistensi, namun tidak mampu melawan kekuatan yang bersifat sistemik dan terinstitusionalisasi. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan tersebut bukan sekadar tindakan individual, melainkan praktik struktural yang berfungsi untuk mengontrol, membungkam, dan mendehumanisasi perempuan dalam konteks kolonial.

Normalisasi Kekerasan Berulang dalam Sistem Militer

“Lalu tentara yang lain datang silih berganti setiap hari.”

Frasa “silih berganti setiap hari” menunjukkan bahwa kekerasan terjadi berulang dan teratur, bukan kejadian sekali saja. Ini menandakan bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar tindakan individu. Pergantian pelaku memperlihatkan adanya keterlibatan kolektif dalam struktur militer yang sama. Dalam perspektif feminisme, kondisi ini disebut *systemic sexual violence*, yaitu kekerasan yang dilembagakan oleh relasi kuasa dalam situasi perang. Mengacu pada Judith Butler (1990), kekerasan yang terus diulang dapat menjadi sesuatu yang dianggap “normal”. Akibatnya, tubuh perempuan diposisikan sebagai objek kekuasaan, sementara kekerasan itu sendiri tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran, melainkan bagian dari praktik yang dibiarkan berlangsung.

Tubuh Perempuan Sebagai Arsip Trauma

“Pergelangan tangannya patah setelah dilempar ke lantai.”

Kutipan ini menampilkan kekerasan fisik yang tidak hanya melukai tubuh secara langsung, tetapi juga meninggalkan jejak yang menetap. Patah pada pergelangan tangan menjadi tanda bahwa tubuh perempuan berfungsi sebagai “arsip” yang merekam pengalaman traumatis. Luka tersebut bukan sekadar

peristiwa sesaat, melainkan bukti konkret dari kekerasan yang terus melekat dalam ingatan tubuh.

Dalam perspektif teori trauma, sebagaimana dijelaskan oleh Cathy Caruth (1996), trauma tidak sepenuhnya hilang seiring waktu, tetapi tersimpan dalam tubuh dan dapat muncul kembali dalam berbagai bentuk baik fisik maupun psikologis. Dengan demikian, tubuh korban tidak hanya menanggung rasa sakit saat kejadian, tetapi juga membawa dampak jangka panjang yang memengaruhi cara ia merasakan, mengingat, dan memaknai dirinya.

Lebih jauh, kekerasan ini juga mengubah relasi korban dengan tubuhnya sendiri. Tubuh yang sebelumnya menjadi bagian dari identitas diri berubah menjadi pemicu terus-menerus atas pengalaman kekerasan. Akibatnya, terjadi pergeseran identitas tubuh secara permanen: dari yang semula otonom menjadi tubuh yang "ditandai" oleh trauma. Dalam konteks ini, tubuh perempuan bukan hanya objek kekerasan, tetapi juga medium yang menyimpan dan mereproduksi ingatan traumatis tersebut.

Penghapusan Identitas Sosial Perempuan

"Nama Parinem seolah hilang dari percakapan warga."

Kutipan ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhenti pada tubuh, tetapi berlanjut pada ranah sosial melalui penghapusan identitas. Frasa "nama Parinem seolah hilang" menandakan proses erasure atau penghilangan simbolik, di mana korban tidak lagi diakui dalam ruang sosial. Nama, yang seharusnya menjadi penanda keberadaan dan identitas, justru dihapus dari ingatan kolektif masyarakat.

Dalam perspektif feminisme struktural, sebagaimana dijelaskan oleh Raewyn Connell (2005), penghapusan ini merupakan bentuk dehumanisasi simbolik. Perempuan tidak hanya direduksi menjadi objek kekerasan, tetapi juga disingkirkan dari struktur sosial yang memberi makna pada keberadaannya. Dengan kata lain, korban mengalami kehilangan ganda: tubuhnya dikuasai, sementara identitas sosialnya dihapus.

Lebih jauh, hilangnya nama dari percakapan warga menunjukkan adanya mekanisme sosial yang secara tidak langsung melanggengkan kekerasan. Keheningan kolektif ini dapat dibaca sebagai bentuk penyangkalan atau upaya menutupi trauma bersama. Akibatnya, korban tidak hanya terisolasi secara fisik, tetapi juga secara sosial perempuan menjadi "tidak terlihat" dalam komunitasnya sendiri. Dengan demikian, penghapusan nama atau identitas bukan sekadar absennya penyebutan, melainkan proses aktif yang menyingkirkan perempuan dari pengakuan sosial. Hal ini memperkuat posisi korban sebagai subjek yang dimarginalkan, sekaligus menegaskan bahwa kekerasan bekerja tidak hanya melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui penghilangan identitas dalam ruang sosial sehingga korban menjadi tidak dianggap atau tidak terlihat di masyarakat.

Stigma Sosial sebagai Kekerasan Simbolik

"Beberapa menyebutnya pelacur, yang lain pengkhianat negara."

Stigma yang digambarkan pada tokoh perempuan yang ada dalam kutipan ini merepresentasikan mekanisme *victim blaming* yang bekerja secara sistemik dalam struktur sosial patriarkal. "pelacur" dan "pengkhianat negara" bukan sekadar hinaan personal, melainkan bentuk konstruksi makna sosial yang menempatkan

korban sebagai pihak yang bersalah atas kekerasan yang dia alami. Dalam konteks ini, tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek kekerasan fisik, tetapi juga medan produksi makna yang dikendalikan oleh norma dominan.

Label “pelacur” merefleksikan moralitas seksual patriarkal yang mengukur nilai perempuan berdasarkan “kemurnian” tubuhnya. Ketika kekerasan seksual terjadi, alih-alih melihat relasi kuasa yang timpang, masyarakat justru mereproduksi logika bahwa perempuanlah yang “jatuh” atau “menyimpang.” Sementara itu, sebutan “pengkhianat negara” memperluas stigma ke ranah politik, menunjukkan bagaimana tubuh perempuan juga dijadikan simbol kehormatan kolektif, baik keluarga maupun bangsa. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibungkam, tetapi juga dibenarkan melalui narasi nasionalisme yang bias gender.

Mengacu pada konsep kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu (2001), praktik ini bekerja secara halus dan tidak selalu disadari, karena telah terinternalisasi sebagai sesuatu yang “wajar” dalam kesadaran kolektif. Masyarakat, termasuk korban itu sendiri, dapat menerima stigma tersebut tanpa mempertanyakannya, sehingga dominasi patriarki terus direproduksi tanpa paksaan fisik yang eksplisit. Kekerasan simbolik ini menjadi lebih berbahaya karena ia tidak tampak sebagai kekerasan, melainkan sebagai “kebenaran sosial.” Dengan demikian, stigma sosial dalam kutipan tersebut tidak hanya memperparah penderitaan korban, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menjaga tatanan patriarki. Ia menutup kemungkinan resistensi, membungkam suara korban, dan mengalihkan perhatian dari pelaku serta struktur kekuasaan yang seharusnya dipertanggungjawabkan.

Trauma Kolektif dan Ingatan Perempuan

“Aku masih ingat semuanya.”

Pernyataan “Aku masih ingat semuanya” merepresentasikan keberlanjutan trauma yang tidak pernah benar-benar selesai, melainkan terus hidup dalam ingatan korban. Ingatan di sini bukan sekadar aktivitas kognitif, tetapi menjadi ruang afektif tempat pengalaman kekerasan disimpan, diulang, dan dihidupkan kembali. Trauma yang dialami tidak berhenti pada peristiwa itu sendiri, melainkan berlanjut sebagai luka psikis yang menetap dan membentuk cara individu memandang diri serta dunia di sekitarnya.

Lebih jauh, ingatan tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif. Ia terhubung dengan pengalaman perempuan lain yang mengalami kekerasan serupa dalam konteks sosial dan historis yang sama. Dengan demikian, “aku” dalam kutipan ini dapat dibaca sebagai representasi dari suara kolektif perempuan yang selama ini dibungkam. Ingatan menjadi medium yang menghubungkan pengalaman individu dengan sejarah yang lebih luas, terutama sejarah yang kerap dihapus, disangkal, atau dimanipulasi oleh narasi dominan.

Dalam perspektif feminisme poskolonial, sebagaimana dikemukakan oleh Spivak (1988), ingatan perempuan berfungsi sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni narasi negara dan kekuasaan. Negara sering kali memproduksi sejarah resmi yang menyingkirkan pengalaman korban, terutama perempuan, demi menjaga citra stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, tindakan “mengingat” menjadi politis, dia menolak lupa, menolak diam, dan menolak tunduk pada penghapusan sejarah. Ingatan menjadi arsip alternatif yang menyimpan kebenaran yang tidak diakui secara institusional.

Selain itu, ingatan juga berfungsi sebagai bentuk klaim atas pengalaman dan identitas. Dengan mengatakan “aku masih ingat semuanya,” subjek menegaskan keberadaannya sebagai saksi sekaligus penyintas. Ia menolak direduksi menjadi korban pasif yang dilupakan, dan justru menempatkan dirinya sebagai agen yang memiliki otoritas atas narasinya sendiri. Dalam hal ini, ingatan menjadi praktik perlawanan yang subtil namun kuat, dia tidak hanya mempertahankan sejarah, tetapi juga membuka ruang bagi kemungkinan rekognisi, keadilan, dan pemulihan.

Dengan demikian, kutipan tersebut tidak hanya mengungkap trauma individual, tetapi juga menunjukkan bagaimana ingatan perempuan bekerja sebagai bentuk perlawanan terhadap penghapusan, pembungkaman, dan distorsi sejarah. Ia menjadi fondasi bagi kesadaran kritis sekaligus alat untuk menantang struktur kekuasaan yang berupaya mengendalikan narasi tentang kekerasan dan korban.

Pengabaian Sosial Terhadap Penderitaan Perempuan

“Tidak ada satupun yang benar-benar peduli pada apa yang dialami Parinem”

Kutipan ini merepresentasikan apa yang dapat disebut sebagai *structural neglect*, yakni bentuk pengabaian yang tidak bersifat individual semata, tetapi berakar dalam sistem sosial yang lebih luas. Ketidakpedulian terhadap penderitaan Parinem bukan sekadar kegagalan empati antarindividu, melainkan cerminan dari struktur sosial yang tidak menyediakan ruang pengakuan, perlindungan, maupun pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Dalam konteks ini, penderitaan perempuan menjadi sesuatu yang “tidak terlihat” atau dianggap tidak cukup penting untuk direspons secara kolektif.

Pengabaian ini bekerja melalui normalisasi masyarakat terbiasa melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang lumrah atau tidak mendesak untuk ditangani. Akibatnya, korban tidak hanya menghadapi luka fisik dan psikis akibat kekerasan awal, tetapi juga mengalami keterasingan sosial karena tidak adanya dukungan emosional maupun institusional. Ketika tidak ada pihak yang “benar-benar peduli,” korban dipaksa memikul beban traumanya sendiri, tanpa validasi atas pengalaman yang dialaminya.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan kegagalan mekanisme sosial dalam menjalankan fungsi perlindungan. Keluarga, komunitas, hingga institusi yang seharusnya menjadi ruang aman justru absen atau bahkan ikut mereproduksi pengabaian tersebut. Dalam perspektif feminisme kontemporer, sebagaimana dikemukakan oleh Saraswati (2022), pengabaian pascakekerasan ini dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan pascatrauma yakni kekerasan yang tidak lagi berbentuk tindakan langsung, tetapi hadir melalui ketiadaan respons, pengakuan, dan dukungan. Dengan kata lain, diamnya masyarakat bukanlah netral, melainkan turut memperpanjang dan memperdalam luka korban. Selain itu, pengabaian sosial juga berimplikasi pada terhambatnya proses pemulihan dan rekonstruksi identitas korban. Tanpa adanya pengakuan sosial, pengalaman traumatis cenderung terinternalisasi sebagai rasa malu, bersalah, atau tidak berharga. Hal ini memperkuat isolasi psikologis dan menghalangi korban untuk bersuara atau mencari keadilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mempertahankan siklus kekerasan karena tidak adanya mekanisme sosial yang secara aktif menolak dan mengoreksi ketidakadilan tersebut.

Dengan demikian, kutipan ini menegaskan bahwa penderitaan perempuan tidak hanya diperparah oleh kekerasan yang dialaminya, tetapi juga oleh absennya kepedulian sosial. *Structural neglect* berfungsi sebagai bentuk kekerasan yang senyap namun sistemik, yang tidak hanya mengabaikan korban, tetapi juga secara tidak langsung melegitimasi keberlanjutan kekerasan itu sendiri.

Dominasi Narasi Laki-laki dalam Pengisahan Trauma Perempuan

“Suami Parinem menceritakan semua itu dengan suara yang datar...”

Kutipan ini tidak hanya menunjukkan pengambilalihan pengalaman perempuan oleh suara laki-laki, tetapi juga menandai terjadinya *narrative authority shift* yang bersifat struktural. Suami menjadi subjek yang memiliki otoritas untuk menyusun, memilih, dan menyampaikan kembali peristiwa traumatis yang sesungguhnya dialami oleh Parinem. Dalam proses ini, pengalaman perempuan direduksi menjadi representasi yang telah difilter melalui perspektif laki-laki, sehingga tidak lagi hadir sebagai suara otentik korban.

Nada “datar” dalam pengisahan juga mengindikasikan adanya depolitisasi dan desensitisasi trauma. Emosi yang semestinya melekat pada pengalaman kekerasan justru dihilangkan, sehingga penderitaan perempuan tampak sebagai peristiwa biasa atau bahkan kehilangan urgensinya. Hal ini memperlihatkan bagaimana narasi laki-laki tidak hanya menggantikan suara perempuan, tetapi juga berpotensi mengontrol makna dan intensitas trauma itu.

Dalam kerangka feminisme naratif, sebagaimana dikemukakan oleh Judith Butler (1990), identitas dan pengalaman subjek dibentuk melalui praktik diskursif. Ketika perempuan tidak memiliki ruang untuk menarasikan dirinya, maka dia kehilangan agensi atas tubuh dan pengalamannya. Dengan demikian, Parinem tidak hanya menjadi korban kekerasan secara fisik, tetapi juga mengalami kekerasan simbolik melalui penghapusan suaranya dalam ruang naratif. Lebih jauh, dominasi ini memperlihatkan relasi kuasa yang bekerja secara halus: laki-laki tidak sekadar menjadi pencerita, tetapi juga penentu legitimasi cerita. Apa yang dianggap “benar”, “penting”, atau “layak diingat” tentang trauma perempuan ditentukan oleh sudut pandang laki-laki. Akibatnya, pengalaman perempuan berisiko mengalami distorsi, penyederhanaan, bahkan penghilangan aspek-aspek penting yang tidak sesuai dengan kerangka pikir patriarkal.

Dengan demikian, kutipan ini mengungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti pada peristiwa traumatis itu sendiri, tetapi berlanjut dalam ranah representasi. Pengambilalihan narasi menjadi bentuk lanjutan dari dominasi patriarki, di mana perempuan tidak hanya dibungkam, tetapi juga “diceritakan” oleh pihak lain yang memiliki kuasa lebih besar atas wacana.

4. Kesimpulan

Penelitian cerpen Pengakuan Suami Parinem merepresentasikan pengalaman perempuan sebagai hasil persilangan kekerasan kolonial, patriarki, dan struktur sosial yang timpang. Perempuan mengalami kekerasan seksual sistemik, subordinasi, penghapusan identitas, stigma sosial, serta pengabaian kolektif yang memperpanjang trauma.

Selain sebagai objek kekerasan, tubuh perempuan berfungsi sebagai arsip trauma atas segala kejadian yang pernah dialami. Sementara dominasi narasi laki-laki menandai hilangnya otoritas perempuan atas pengalaman dan suaranya.

Namun, resistensi tetap hadir melalui ingatan traumatik yang berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap penghapusan sejarah. Dengan demikian, perempuan dalam teks ini merupakan subjek historis yang posisinya terus dinegosiasikan dalam struktur kuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Chandra Talpade Mohanty, Judith Butler, dan Raewyn Connell.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination*. Stanford University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble*. Routledge.
- Caruth, C. (1996). *Unclaimed experience*. Johns Hopkins University Press.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities (2nd ed.)*. University of California Press.
- Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the intersection of race and sex*. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167
- Jabrohim. (2015). *Teori penelitian sastra*. Pustaka Belajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mohanty, C. T. (2003). *Feminism without borders*. Duke University Press.
- Mukminin, M. S. (2024). Representation of violence and resistance of female characters in the Perempuan Tanah Jahanam. *Jurnal Penelitian: Ilmu Ilmu Sosial*, 5(2)
- Mustaqim, A. H. (2018). Ketertindasan dan perlawanan perempuan interseksionalitas dalam cerpen "Pohon Api" karya Oka Rusmini. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 8(1)
- Nensilianti, Ridwan, & Ramadani, A. S. (2025). *Relasi kuasa dalam Novel Pulang Karya Leila S. Chudori* Perspektif Michael Foucault
- Nensilianti, Arjun, & Ridwan. (2023). Ancaman otoritas Belanda terhadap pribumi yang prokemerdekaan Dalam Novel Rindu Karya Tere Liye: Kajian Postkolonial Edward. *Totobuang*, 11(2), 217-230
- Priyatni, E. T. (2010). *Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis*. Bumi Aksara.
- Spivak, G. C. (1988). *Can the subaltern speak? Dalam C. Nelson & L. Grossberg* (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (hlm. 271-313). University of Illinois Press.
- Yuval-Davis, N. (1997). *Gender and nation*. Sage Publications